



LAPORAN KINERJA

DP3AP2KB TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang setidaknya memuat Visi, Strategi dan Program serta menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu di perbaiki. Kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi mengarah pada penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya (LKjIP) ini.

Batulicin, 2 Januari 2025
Kepala Dinas P3AP2KB

Erli Yuli Susanti, S. H., M.H
NIP. 19840714 201001 2 038

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan Analisa dan pengumpulan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran Pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan tugas dan fungsinya telah berupaya secara optimal dalam mewujudkan sasaran strategis. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai pada Tahun 2024 yaitu :

Sasaran 1 :

Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA

Indikator Kinerja :

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Scoring Kota Layak Anak Kabupaten

Sasaran 2 :

Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga

Indikator Kinerja :

- Angka Kelahiran Total (TFR)
- Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Adapun capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk Tahun 2024 masih belum ada, dikarenakan belum rilis dari BPS, sehingga menggunakan data sementara Tahun 2023. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 67,75 (dari target 68,84) atau dengan capaian 98,42%, Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 85,74 (dari target 85,12) atau dengan

tingkat capaian 100,73%, Scoring Kota Layak Anak Kabupaten menggunakan Data Tahun 2023 dikarenakan data dari Kementerian PPA belum rilis. Scoring Kota Layak Anak Kabupaten Tahun 2023: 633,51 (dari target 950) atau dengan tingkat capaian 66,69%, Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2024 : 2,20 (dari target 2,21) tingkat capaian 100,45% , Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) Tahun 2024 : 63,57 (dari target 61) tingkat capaian 104,21%.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dicapai melalui Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan Pagu Anggaran Rp. 12.674.819.020, realisasi sebesar Rp. 11.785.659.195 atau Tingkat capaian 92,98%. Anggaran belanja operasi DP3AP2KB Kab.Tanah TA. 2024 adalah sebesar Rp. 19.280.139.269,- yang terbagi menjadi belanja rutin operasional kantor sebesar Rp 18.028.267.269,- dan belanja modal sebesar Rp 1.251.872.000,- (Bangunan Kantor UPTD & Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Balai KB di Kecamatan). Adapun Realisasi Belanja sebesar Rp 17.800.686.058,- atau 92,33%.

Batulicin, 2 Januari 2025
Kepala Dinas P3AP2KB

Erli Yuli Susanti, S. H., M.H
NIP. 19840714 201001 2 038

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR PENGHARGAAN	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok & Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Permasalahan Utama Dinas P3AP2KB	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 TUJUAN DAN SASARAN	8
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	9
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024	10
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
D. RENCANA KERJA TAHUNAN	11
E. LAPORAN KINERJA INTERIM/TRIWULANAN	12
F. MATRIKS KESELARASAN	12
G. RENCANA AKSI TAHUN 2024	12
H. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	16
I. HASIL EVALUASI KINERJA	16
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Dinas P3AP2KB Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu	17
A. Capaian Kinerja Dinas P2AP2KB Tahun 2024	18
A. 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	20
A. 2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	70
A. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	72
A. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (BKKBN dan Kementerian PPA)	75

A. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	76
A. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
A. 7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	100
B. REALISASI ANGGARAN.....	101
BAB IV	114
PENUTUP	114
4.1 Kesimpulan	114
4.2 Saran.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Seluruh Pegawai Dinas P3AP2KB Tahun 2024.....	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	13
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Utama Strategi Tahun 2024.....	20
Tabel 3.3	Hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.....	21
Tabel 3.4	Hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.....	46
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun
2. Penetapan Kinerja
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Rencana Kerja Tahunan
5. Laporan Kinerja Interim/Triwulanan
6. Laporan Keuangan Triwulan IV
7. Cascading/Pohon Kinerja
8. Matriks Keselarasan
9. Rencana Aksi
10. Pengukuran Kinerja
11. Hasil Evaluasi Kinerja
12. Laporan Kinerja SKPD
13. Daftar Penghargaan yang diterima SKPD Tahun 2023

DAFTAR PENGHARGAAN

No	Foto/Sertifikat	Ket
1		Piagam Penghargaan Tahun 2024 Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Juara I kategori Mitra Bapak/Bunda Asuh Anak STUNTING Terbanyak Tahun 2023
2		Piagam Penghargaan Kabupaten Tanah Bumbu Juara 3 Kategori Ingenting Capaian Terbanyak Tahun 2024
3		Piagam Penghargaan Kabupaten Tanah Bumbu Juara I Target MKJP dan Juara 3 Target Total

4		Piagam Penghargaan Kabupaten Tanah Bumbu Kader BKB Bahagia Kabupaten Tanah Bumbu
5		Penghargaan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kategori “ Madya “ Peningkatan Kualitas Keluarga desa Danau Indah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
		

Batulicin, 2 Januari 2025
Kepala Dinas P3AP2KB

Erli Yuli Susanti, S. H., M.H
NIP. 19840714 201001 2 038

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi.....	3
------------	--------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu adalah SKPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan menyangkut bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang ditemui dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dasar penyusunan LkjiP ini adalah dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai penetapan kinerja tahun 2024 yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program,

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

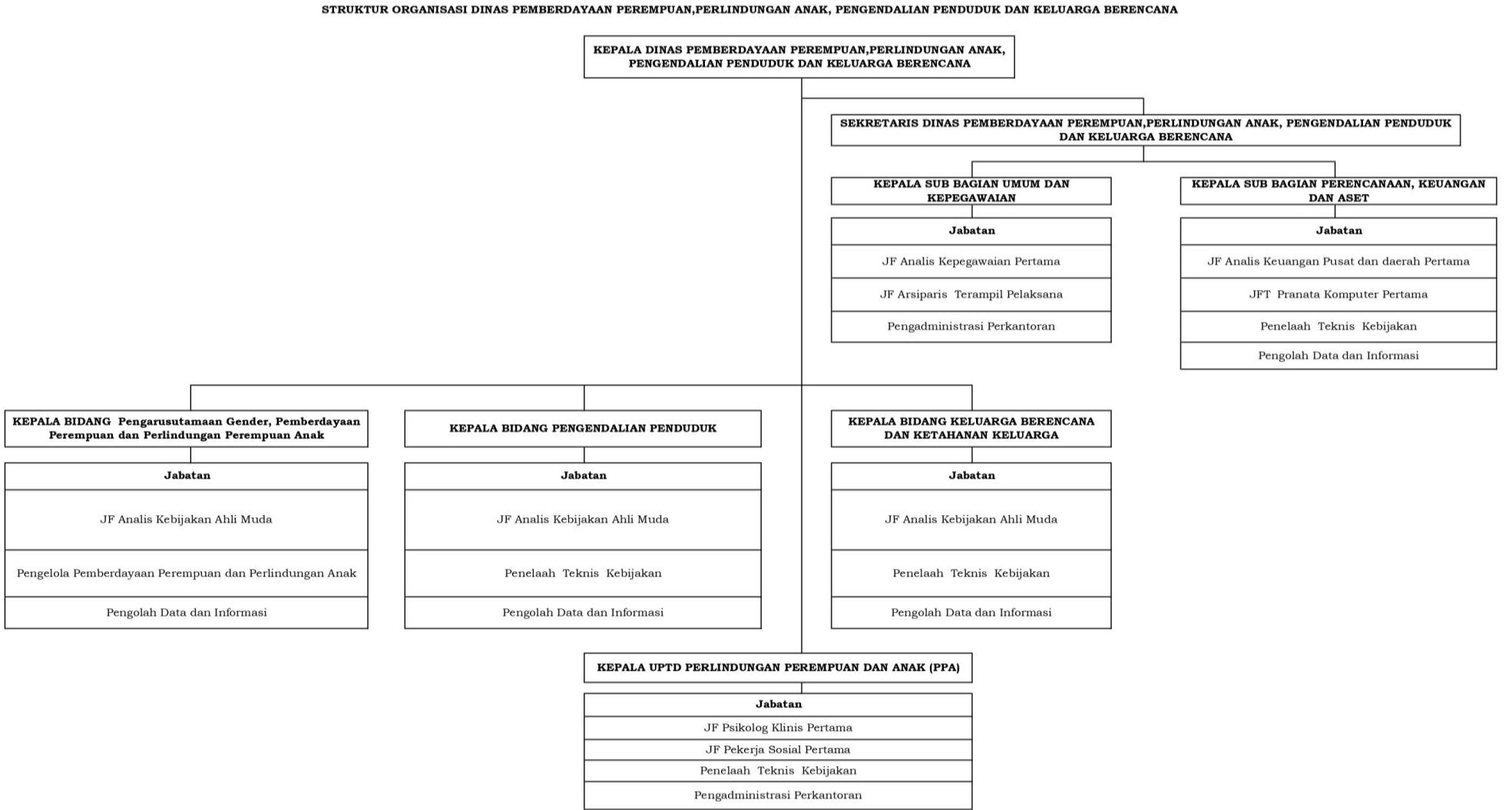
1.2 Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas didukung oleh tiga bidang dan sekretariat.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Stuktur Organisasi DP3AP2KB Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktur jabatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- d. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar. Jumlah seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 berjumlah 52 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Seluruh Pegawai Dinas P3AP2KB Tahun 2024

No	Bidang/Sub Bagian Bagian	ASN	NON ASN	NON TEKNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1				1	1
2	Sekretaris	1				1	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	3	9	8	7	15
	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	4	4	-	3	5	8
4	Bidang Pengendalian Penduduk	2	5	-	3	4	7
5	Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga	3	4	1	2	6	8
6	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	2	-	1	4	5
7	UPTD PPA	2	4	1	4	3	7
Jumlah							52

Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu adanya Petugas yang handal di lapangan guna melakukan penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) bagi PNS dan Petugas Administrasi bagi PTT. Oleh karena itu maka di bentuk UPT di Kecamatan yang dipimpin seorang Koordinator PKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di wilayah kerjanya dan sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

1.4 Permasalahan Utama Dinas P3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya Implementasi Pengarusutamaan Gender;
2. Masih Tingginya Ketimpangan Gender (IKG);
3. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak-hak Anak;
4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap pembinaan Ketahanan Keluarga;
6. Masih Tingginya Perkawinan Usia Anak;
7. Belum Optimalnya Pemenuhan masyarakat dalam pelayanan KB

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan LKJ Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah - langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 s.d. level pelaksana, fungsional dan PPPK;
2. Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan 2025;
3. IKU SKPD Tahun 2024 dan 2025;
4. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2024 dan 2025;
5. Laporan Kinerja Interim/Triwulanan Tahun 2024;
6. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2024;
7. Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2024 dan 2025;
8. Matrik Keselarasan Tahun 2024 dan 2025;
9. Rencana Aksi Tahun 2024 dan 2025;
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
11. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024;
12. Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun 2024;
13. Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2024 (jika ada).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu yakni Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan tujuan sesuai renstra 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA
- b. Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sasaran/tujuan dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama “Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA”, sasaran pertama adalah : “Meningkatnya Pelaksanaan PUG (kategori APE)” dan sasaran kedua adalah “Meningkatnya IPM perempuan” dan sasaran ketiga “Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak”.
2. Sasaran dari tujuan kedua “Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga”, sasaran pertama adalah: “Menurunnya Angka Kelahiran” dan sasaran kedua adalah “Meningkatnya Kesejahteraan keluarga”

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan dan sub kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,84
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,12
		Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	950
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun	2,21
		Indeks Pembangunan keluarga (ibangga)	61

NO	Kegiatan		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.605.320.249,00
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	1.538.412.800,00
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp	199.191.360,00
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	166.477.500,00
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp	90.279.500,00
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA	Rp	410.620.800,00
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	1.150.386.740,00
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp	1.152.185.700,00
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	5.575.540.820,00
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	2.391.723.800,00

Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur (Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2024 terlampir).

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun dan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yaitu antara Bupati Tanah Bumbu selaku kepala daerah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Pengguna Anggaran SKPD untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki SKPD. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pengguna anggaran wajib menyusun penetapan kinerja dimaksud setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja ini Kepala SKPD agar memperhatikan sekurangnya hal berikut, yaitu :

- 1). Dokumen perencanaan jangka menengah;
- 2). Dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan

- 3). Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama SKPD, serta target kinerja dan pagu anggaran.

Maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan fungsinya seperti:

1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD selama jangka waktu satu tahun anggaran;
2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LKjIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;
3. Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah dilakukan serta pelaksanaan tindakan dimasa yang akan datang (Penetapan Kinerja SKPD tahun 2024 terlampir)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu (IKU Tahun 2024 terlampir) sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten
4. Angka Kelahiran Total (TFR)
5. Indeks Pembangunan keluarga (ibangga)

D. RENCANA KERJA TAHUNAN

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu
(Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 terlampir)

E. LAPORAN KINERJA INTERIM/TRIWULANAN

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun. (Laporan Kinerja Interim/Triwulanan Tahun 2024 terlampir)

F. MATRIKS KESELARASAN

Matriks Keselarasan disusun sesuai dengan cascading/pohon kinerja, berisi sasaran SKPD beserta Indikator Kinerja, Uraian sasaran dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. (Matriks Keselarasan SKPD Tahun 2024 terlampir)

G. RENCANA AKSI TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai Visi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun rencana aksi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta merupakan suatu rencana aksi nyata untuk pencapaian IKU yang sesuai dengan perencanaan kinerja dan dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2024. Berdasarkan program-program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Meningkatnya Pelaksanaan PUG (kategori APE)	Mengaktifkan focal point PUG (SKPD)	Menyusun kebijakan Peraturan Daerah tentang PPRG
				Sosialisasi kebijakan tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik dan ekonomi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Membina Desa yang menjadi pilot Project pelaksanaan PUG
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan KDRT
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
				Koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan
		Meningkatnya IPM perempuan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Mengembangkan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

VISI : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak
				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Penataan Kelembagaan PHA	Koordinasi dan Sinkronisasi antar lembaga pemerintah dan non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam upaya pemenuhan hak anak
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemenuhan hak anak	Meningkatkan Penyediaan Layanan pemenuhan hak anak
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
				Pembinaan Jejaring antar lembaga penyedia layanan non pemerintahan
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Advokasi kebijakan dan pendampingan anak korban kekerasan
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	Menurunnya Angka Kelahiran	Penyediaan Layanan Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan standar pelayanan minimal bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Penyusunan kebijakan terkait Grand Desain Kependudukan
			Meningkatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan

VISI : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
			Mengendalikan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Monitoring faskes, jaringan dan jejaring pelayanan KB
			Meningkatkan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam meningkatkan kepersertaan KB aktif MKJP
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
		Meningkatnya Kesejahteraan keluarga	Meningkatkan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Menyelenggarakan Pelatihan Teknis bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2024, berikut matrik rencana aksi dalam rangka pencapaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan di tahun 2024. (Rencana Aksi Tahun 2024 terlampir)

H. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran Kinerja SKPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilaksanakan target dan capaian/realisasi, serta persentase capaian kinerja pelaksanaan tugas. (Pengukuran Kinerja Tahun 2024 terlampir)

I. HASIL EVALUASI KINERJA

Hasil Evaluasi Kinerja merupakan laporan hasil capaian Eselon II, Eselon III (Sekretariat dan Bidang), dan Eselon IV di SKPD, dengan capaian target dan realisasi yang sudah terlaksana di tahun 2024. (Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024 terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Dinas P3AP2KB Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu :

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	2022		2023	
		Bobot	Nilai AK	Bobot	Nilai AK
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10	30	24,69
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50	30	23,54
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30	15	12,46
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,16	25	19,68
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,16		80,37
			A		A

Ada beberapa Rekomendasi yang diberikan sebagai perbaikan antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan perbaikan dokumen IKU sesuai standar serta menggambarkan hubungan kesinambungan dan kelarasan dengan dokumen perencanaan lainnya

2. Pelaporan Kinerja

A. Melakukan reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja;

B. Informasi Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai standar yang tercantum Lampiran Surat Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Nomor a/051.2/1318/ ORG.3/Setda/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) dengan mencantumkan Realisasi Anggaran pada Bab III huruf C.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Membuat Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari beberapa Rekomendasi yang diberikan, berikut tindak lanjut yang dilakukan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Upaya perbaikan untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SAKIP DP3AP2KB) antara lain :

1. Perbaikan dokumen IKU sesuai standar
2. Pelaporan Kinerja
 - A. Melakukan Review terhadap Dokumen Laporan Kinerja
 - B. Perbaikan Dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Nomor a/051.2/1318/ORG.3/Setda/XII/2023.
3. Membuat Dokumen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - A. Capaian Kinerja Dinas P2AP2KB Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan. Sub kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2024 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance*

improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja Utama, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian	Nilai Means
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil	95,5
2	81 % sampai 90 %	Baik (Berhasil)	85,5
3	61 % sampai 80 %	Cukup (Berhasil)	70,5
4	Kurang dari 60 %	Kurang (Berhasil)	30,5

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2024. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ada 2 (dua) Kinerja Utama, ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Utama Strategi Tahun 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian Kinerja	Kategori	Nilai Means
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,84	67,75 (Data 2023)	98,42%	Sangat Berhasil	95,5
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,12	85,74 (Data 2023)	100,72%	Sangat Berhasil	95,5
		Scoring Kota Layak Anak Kabupaten	950	633,51 (Data 2023)	66,69%	Cukup (Berhasil)	70,5
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,21	2,20	100,45%	Sangat Berhasil	95,5
		Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	61	63,57	104,21%	Sangat Berhasil	95,5

Capaian Indikator Kinerja Utama (Sangat Berhasil) = $(4 \times 95,5) / 5 = 76,40$

Capaian Indikator Kinerja Utama (Cukup Berhasil) = $(1 \times 70,5) / 5 = 14,10$

Total rata-rata capaian Kinerja Utama = 90,50

Secara keseluruhan, capaian kinerja utama Eselon II berada pada kategori SANGAT BERHASIL. Untuk Realisasi IDG, IPG sementara menggunakan Realisasi Tahun 2023, dikarenakan menunggu data 2024 dari BPS Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk data Scoring Kota Layak Anak Kabupaten menggunakan data tahun 2023, dikarenakan data belum rilis dari Kementerian PPA.

Dari tabel diatas dapat diuraikan evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama tersebut.

A. 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program

atau kegiatan dengan membandingkan persentase capaian indikator Sasaran pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA

Tabel 3.3
Hasil pengukuran kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	-Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) -Indeks Pembangunan Gender (IPG) -Scoring Kota Layak Anak Kabupaten	3.555.368.700	3.214.176.245	90,40%

Sasaran 1 (satu) yaitu : Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA memiliki indikator kinerja utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Scoring Kota Layak Anak Kabupaten.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 3 (tiga) indikator sasaran pada Tahun 2024. Pada IKU pertama capaian nilai realisasi Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA sebesar Rp 3.214.176.245 dengan target yang telah ditetapkan Rp 3.555.368.700 atau dengan tingkat capaian 90,40%.

Terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024 guna mewujudkan sasaran strategis tersebut sesuai tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	-Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) -Indeks Pembangunan Gender (IPG) -Scoring Kota Layak Anak Kabupaten	3.555.368.700	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	73.810.300
						Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	11.296.600
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.415.124.500
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	17.804.600
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.376.800
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	61.555.100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.168.660
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.669.000
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.798.600
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	64.007.900
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.900.800
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.215.500
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.915.300

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.438.000
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	80.888.300
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.391.200
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.823.100
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	302.618.200
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.256.300
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.923.200

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	0
						Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	56.550.300
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	199.620.940
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	819.295.000
						Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	16.780.500
						Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	58.140.000

Dari tabel tersebut terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024 yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator kinerja Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Kabupaten (dari target target persentase sebesar 65% dengan realisasi 27,54% atau dengan tingkat capaian 42,37%. Data Penyebut/pembagi Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD masih menggunakan Data Tahun 2023 (dikarenakan LRA 2024 belum ada). Indikator ini mengindikasikan formulasi Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD berbanding Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD. Perencanaan berbasis gender di Kabupaten masih kecil. Idealnya ARG Kabupaten sebesar 50% dari belanja operasional dan modal APBD kabupaten. Capaian tahun 2024 termasuk rendah dibanding tahun 2023 yakni 37,71%, hal ini disebabkan belum semua perangkat daerah yang menyusun dan menyerahkan dokumen GAP dan GBS.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah program yang bertujuan untuk mencapai sasaran kebijakan :

- a. Menyusun kebijakan Peraturan Daerah tentang PPRG
- b. Sosialisasi kebijakan tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- c. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- d. Pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik dan ekonomi

Dalam pencapaian . Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - b. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Kepada Organisasi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota kepada Organisasi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	100%
3.	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
5	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Target 50 Perangkat Daerah Tahun 2024, terealisasi 50 Perangkat daerah atau dengan tingkat capaian sebesar 100% telah terlaksana dengan maksimal di tahun 2024.
- 2) Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG), dengan Target 50 Perangkat Daerah Tahun 2024, terealisasi 50 Perangkat daerah atau dengan tingkat capaian sebesar 100%
- 3) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau dengan tingkat capaian 100%. Output sub kegiatan dalam bentuk dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi kepada peserta organisasi wanita.
- 4) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan indikator Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 30 Organisasi dan terealisasi 30 Organisasi atau dengan tingkat capaian 100%.
- 5) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan

Kapasitas (orang) dengan target tahun 2024 sebanyak 50 orang dan terealisasi 50 orang atau tingkat capaian sebesar 100%.

2. Program Perlindungan Perempuan, dengan Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan (%), target tahun 2024 sebesar 90% dan terealisasi 90% atau tingkat capaian sebesar 100%.

Dalam pencapaian Program Perlindungan Perempuan, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	5 Layanan	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	100%
4	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau dengan tingkat capaian 100%. Output sub kegiatan dalam bentuk dokumen laporan adanya kerja sama dengan jejaring serta adanya pembuatan perjanjian kerja sama dengan Polres, RSUD, dan RS swasta.
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 5 layanan dan terealisasi 5 layanan atau dengan tingkat capaian 100%. Output sub kegiatan dalam bentuk dokumen laporan pelaksanaan tindak lanjut layanan pengajuan :
 - a. Mediasi
 - b. Pelayanan pengaduan
 - c. Pendampingan
 - d. Penjangkauan
 - e. Pengelolaan kasus
- 3) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas. Dari target tahun 2024 sebanyak 10 Orang dan terealisasi 10 Orang atau dengan tingkat capaian 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau dengan tingkat capaian 100%. Output sub kegiatan dalam bentuk dokumen laporan pelaksanaan pelatihan bagi kader PATBM yang menghasilkan sertifikat untuk peserta yang berhadir.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan indikator kinerja Indeks kualitas keluarga (%), (%). Target Tahun 2024 sebesar 54 dengan realisasi 79,61 atau dengan tingkat capaian 147,43% Indikator ini mengindikasikan formulasi terhadap 5 pilar, meliputi : Legalitas, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya. Dalam pencapaian Program Perlindungan Perempuan, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan KG dan Hak Anak (%). Target tahun 2024 sebesar 0.53 dan realisasi 0.91. didapatkan dari Kumulatif jumlah keluarga yg mendapatkan pembinaan kesetaraan gender dan hak anak pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024. (Desa Temuni 99, emil baru 230, setarap 317, danau indah 170 = 816/jumlah seluruh keluarga Kabupaten Tanah Bumbu (88.938). Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Predikat Layanan Puspaga (Kategori), Predikat Puspaga di Dinas P3AP2KB dalam kategori Madya, Puspaga dapat melayani 4 jenis layanan dari 4 jenis layanan yang ditargetkan. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak (%), dengan target tahun 2024 sebesar 80% dan terealisasi 80%, terlaksananya 4 jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG hak anak yaitu 1. Penerimaan pengaduan 2.Konsultasi 3.Konseling 4.Bimbingan dan informasi masyarakat. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	38 orang	76%
5	Terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	4 Layanan	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia, dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan, target Tahun 2024 sebanyak 1 Lembaga, dan terealisasi 1 Lembaga.
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas belum mencapai dari target 50 sumberdaya, ada 38 orang yang sudah mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluargadalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Tahun 2024 sebanyak 4 layanan dan terealisasi 4 layanan.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan indikator kinerja Tingkat ketersediaan informasi gender dan anak (%), Tahun 2024 dengan target 80% dan realisasi 100%. Karena sudah terbentuknya KLA kecamatan (12 kecamatan). Program ini mengindikasikan formulasi agregat data gender dan anak yang tersedia, Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan Buku profil data gender dan anak (dokumen) yang memuat capaian kinerja keberhasilan per gender berdasarkan kategori : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Data perempuan dalam pembangunan. Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah profil data gender dan anak (dokumen) , dengan target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan Target Tahun 2024 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen atau dengan tingkat capaian 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota dengan Target Tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen berbentuk Buku Profil Terpilah Gender Kabupaten atau dengan tingkat capaian 100%.

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), diukur dengan indikator Persentase kecamatan menuju Kecamatan Layak Anak (KLA), target tahun 2024 sebesar 80, realisasi Tahun 2024 Kecamatan yang memenuhi 5 klaster di Kabupaten Tanah Bumbu ada 12 Kecamatan dari yang memenuhi 11 indikator dari 11 indikator kategori KELANA (Kecamatan Layak Anak). Penilaian kecamatan menuju kecamatan Layak Anak dilakukan untuk mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase lembaga pemerintah dan non Pemerintah

dan Dunia Usaha yang mendukung PHA (%). Terjadi peningkatan keaktifan 22 lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tergabung dalam tugas tugas kabupaten, terbentuknya 12 tugas-tugas KLA kecamatan dan terbentuknya forum anak di 53 desa. Target tahun 2024 sebesar 32,04% dan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase lembaga yang mendapat penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas hidup anak (%), Tahun 2024 dengan target 76,33%, terealisasi 86% atau dengan tingkat capaian kinerja 112,66%. Komponen pencapaian indikator tersebut berkenaan dengan jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan berbanding dengan keseluruhan jumlah Lembaga penyedia layanan KHA yang menjadi sasaran. Terdapat 6 lembaga yang mendapat pembinaan 1. Tara/daycare 2. sekolah ramah anak 3. puskesmas ramah anak 4. tempat ibadah (masjid) 5. desa kelurahan layak anak 6. kecamatan layak anak . Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	874 Orang	364,17%
3.	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen, dengan kondisi Kegiatan Asosiasi perusahaan sahabat anak indonesia (APSAI) tidak dilaksanakan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, output sub kegiatan berupa layanan sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, desa ramah anak, Tahun 2024 dengan target 240 anak dan terealisasi 874 anak.
- 3) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Target Tahun 2024 3 Dokumen dan terealisasi 3 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Target tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, diukur dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (nilai), untuk Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 sebesar 80. Realisasi belum ada dikarenakan masih menunggu penilaian dari Kementerian PPPA. Realisasi Tahun 2023 sebesar 63,52. dengan rincian sebagai berikut : Kluster 1 =15, kluster 2 = 15, kluster 3 = 22,88, kluster 4 = 9.225, kluster 5= 27,61. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak (%), target Tahun 2024 sebesar 71,43% dan terealisasi 71,43%. Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan dan tersedianya layanan penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
 - a. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase lembaga layanan yang memiliki standar pelayanan minimal bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (%), Tahun 2024 dengan target 100%, realisasi 100% karena Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sudah memiliki UPTD. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 5) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase pemenuhan standar UPTD (%), target Tahun 2024 81,82% dan terealisasi 81,82%, Terlaksananya Pelayanan Penanganan terhadap korban yang memerlukan tindak lanjut. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
- a. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
 - b. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	-	-	0%
2	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	11 Orang	11 Orang	100%
3	Terlaksananya Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	5 Layanan	5 Layanan	100%
4	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
5	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
6	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	46 Orang	46 Orang	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA di Hapus sewaktu menyusun anggaran Perubahan, sehingga tidak terealisasi.
- 2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Tahun 2024 dengan target 11 Perangkat Daerah dan terealisasi 11 Perangkat Daerah yang sudah terlaksana Advokasi.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, target Tahun 2024 sebanyak 5 Layanan dan realisasi 5 Layanan (Pengaduan, Konseling kasus, Mediasi, Home visit, Pendampingan korban).
- 4) Sub Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota dengan Indikator Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar (Lembaga), target tahun 2024 1 lembaga dan terealisasi 1 lembaga.
- 5) Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota dengan Indikator Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan), target tahun 2024 sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan.
- 6) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang), target 46 orang dan terealisasi 46 orang atau capaian 100%.

Sasaran 2 : Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA

Tabel 3.4
Hasil pengukuran kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	-Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun -Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	9.119.450.320	8.571.482.950	94%

Sasaran 2 (satu) yaitu : Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga memiliki indikator kinerja utama Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun dan Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga).

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 2 (dua) indikator sasaran pada Tahun 2024. Pada IKU kedua capaian nilai realisasi Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga sebesar Rp 8.571.482.950 dengan target yang telah ditetapkan Rp 9.119.450.320 atau dengan tingkat capaian 94%.

Terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024 guna mewujudkan sasaran strategis tersebut sesuai tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	- Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun - Indeks Pembangunan keluarga (ibangga)	9.119.450.320	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	24.891.200
						Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	40.740.000
						Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	4.799.600
						Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	6.807.000
						Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	4.498.000
						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	6.119.400
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	7.842.000
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	444.202.900

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	59.600.000
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	409.375.100
						Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	68.551.500
						Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	74.759.000
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	194.693.200
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	836.386.200
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	155.529.600

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	599.778.900
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.093.550
						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	261.302.900
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	17.500.000
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.033.615.000
						Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	28.012.800
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.801.200

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	254.471.970
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.008.505.100
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55.225.600
						Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	141.778.000
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	387.135.800
						Pembinaan Terpadu Kampung KB	3.000.000
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	564.711.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120.900.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	94.218.000
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.138.505.800
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	38.100.000

Dari tabel tersebut terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024 yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk, diukur dengan indikator Total Fertility Rate (TFR) usia 15-19 tahun (%). TFR dipergunakan untuk melihat keberhasilan Program KB. Tahun 2024 dengan target 2,21 dan terealisasi 2,20 atau dengan tingkat capaian 100,45%. Indikator ini memuat formulasi menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (ASFR 15-19 th atau ASFR 35-49 th) dikalikan dengan interval kelompok umur (biasanya lima tahun). Semakin rendah TFR, maka semakin rendah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Peningkatan angka TFR salah satu penyebabnya adalah bertambahnya PUS (Pasangan Usia Subur) dan meningkatnya pernikahan usia muda yang diiringi dengan peningkatan kelahiran pada pasangan usia muda. Upaya yang akan dilakukan menekan pernikahan pada usia muda, menekan kelahiran pada usia resiko tinggi. Tahun 2023 angka TFR 2.43 menurun menjadi 2.20 di Tahun 2024, hal ini membuktikan semakin berkurang angka kelahiran menurut umur (ASFR 15-19 th atau ASFR 35 -49 th) dikalikan dengan interval kelompok umur (biasanya lima tahun) semakin bagus.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk diukur dengan indikator Persentase kebijakan yang dipadukan dan disinkronisasikan (%). Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
 - c. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.

- d. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
 - e. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.
 - f. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana.
- 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator jumlah dokumen pemetaan perkiraan penduduk dengan target 1 dokumen pemetaan sudah terealisasi 1 dokumen di tahun 2023 atau tingkat capaian sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
- a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan.
 - b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
 - c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
 - d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.Tanah Bumbu sudah menyampaikan laporan tersebut.
 - e. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain.
 - f. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana.

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
3	Terlaksananya Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
6	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	Tersedia dan terlaksananya Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100%

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
10	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
11	Terbentuknya dan terlaksananya operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	20 Unit	20 Unit	100%
12	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	12 Laporan	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota, Tahun 2024 target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dokumen GDPK.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga dengan Indikator Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga, Target tahun 2024 sebanyak 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen berupa laporan bulanan.
- 3) Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal, target tahun 2024 sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan.
- 4) Sub kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan indikator Jumlah Dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) dengan target Tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dengan Indikator Jumlah dokumen hasil penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, nonformal dan informal, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana dengan indikator Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), Tahun 2024 dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan dengan indikator Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

dengan target tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, atau capaian 100%.

- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan Indikator Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia, target 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - 9) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan Indikator Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga, target 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - 10) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan Indikator Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, target tahun 2024 sebanyak 149 dokumen dan terealisasi 149 dokumen (seluruh desa), atau tingkat capaian 100%. Output sub kegiatan ini berupa dokumen pelaporan dari desa berkenaan dengan data kependudukan. Pada tahun 2024 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu sudah menyampaikan laporan tersebut.
 - 11) Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain dengan Indikator Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk, target Tahun 2024 sebanyak 20 unit dan terealisasi 20 unit.
 - 12) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), diukur dengan indikator Persentase Contracepsi Prevalensi Rate (CPR) (%). Tahun 2024 target mCPR sebesar 80,52% dengan realisasi 73,42% atau dengan tingkat capaian 91,18%. Indikator ini memuat formulasi jumlah akseptor KB berbanding dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS).

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, diukur dengan indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan Prog.KKBPK (%), di Tahun 2024 dengan target 19,69%, terealisasi 19,69% atau dengan tingkat capaian 100%, telah terjalin kerja sama lintas sektor dan mitra kerja. Indikator ini diformulasikan dengan jumlah KK yang menerima materi KIE berbanding jumlah KK. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
 - a. Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - d. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - f. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), diukur dengan indikator Presentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang diberdayakan (%) dengan target 100% terealisasi 100%. Pada tahun 2024 terdapat 38 orang PKB (21 PNS dan 17 PPPK) dan PLKB yang telah diberdayakan. Dengan adanya kebijakan alih Kelola PKB dan PLKB oleh BKKBN Pusat, maka status non ASN tidak dihitung. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
 - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

- c. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- 3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%), Tahun 2024 dengan target 8,04% terealisasi 6,43% atau dengan tingkat capaian 125,04%. Indikator ini diformulasikan dengan jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani berbanding dengan jumlah total PUS. Pada tahun 2024 ada 3.934 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dari total 61.201 Pasangan Usia Subur (PUS). Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
 - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - e. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB diukur dengan indikator Presentase ormas yang aktif dalam peningkatan kepesertaan ber KB masyarakat (%), tahun 2024 dengan target 57,14 dan terealisasi 57,14 atau tingkat capaian 100%.
 - a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB
 - c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	Terlaksananya mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32 Organisasi	32 Organisasi	100%

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
7	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	4 Unit	7 Unit	175%
8	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	496	515	104%
9	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	543	508	94%
10	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	5 Laporan	100%
11	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5999 Orang	5807 Orang	97%
12	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	91 Unit	158 Unit	174%
13	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	3 Laporan	100%
14	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	7 Laporan	7 Laporan	100%

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
15	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
16	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	12 Laporan	100%
17	Terlaksananya Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Kampung	20 Kampung	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK, target tahun 2024 sebanyak 12 Laporan dan terealisasi 12 laporan.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), target tahun 2024 sebanyak 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan indikator Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), target tahun 2024 4 laporan dan terealisasi 4 laporan.
- 4) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan indikator Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan indikator Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 6) Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan indikator Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra

Kerja, tahun 2024 dengan target 32 organisasi dan terealisasi 32 organisasi atau capaian 100%.

- 7) Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan indikator Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit), Target tahun 2024 sebanyak 4 Sarana, terealisasi 7. Didalam DPA 2024 Ada 7 Paket PLKB KIT yang berhasil dibelanjakan.
- 8) Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan indikator Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang). Target tahun 2024 sebanyak 496 orang dan terealisasi 515 orang, karena ada Pemekaran Desa sehingga di perlukan Penambahan Kader.
- 9) Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dengan indikator Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi), tahun 2024 dengan target sebanyak 543 organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana dan terealisasi terealisasi 508 organisasi atau capaian 93,55%.
- 10) Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan), Tahun 2024 target sebanyak 5 laporan dan terealisasi 5 laporan.
- 11) Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang), Tahun 2024 dengan target 5.999 dan terealisasi 5.807 orang tingkat capaian 96,80%.
- 12) Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan indikator Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan indikator Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit). Tahun 2024 dengan target 91 unit sarana, dan terealisasi 158.

- 13) Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan), Tahun 2024 target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan yang menyesuaikan dengan pelaksanaan pembinaan KB di Fasilitas Kesehatan. Laporan berupa Kerja sama dengan faskes, jaringan dan jejaring.
- 14) Sub Kegiatan : Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan indikator Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan). Dengan target Tahun 2024 sebanyak 7 Laporan dan terealisasi 7 Laporan dukungan dan kerja sama tenaga lapangan PLKB.
- 15) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen). Target Tahun 2024 sebanyak 12 Dokumen dan terealisasi 12 Dokumen.
- 16) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan). Target Tahun 2024 sebanyak 20 laporan pembinaan, dan terealisasi 20 laporan.
- 17) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas, dengan indikator Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung). Target Tahun 2024 sebanyak 20 kampung kb dan terealisasi 20 kampung kb.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Tahun 2024 dengan target 61 realisasi 63,57 atau dengan capaian 103,21%. Data dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, iBangga ditujukan untuk mengukur 3 dimensi yaitu, dimensi Ketentraman, dimensi Kemandirian dan dimensi Kebahagiaan keluarga. Dengan 3 klasifikasi TANGGUH, BERKEMBANG dan RENTAN. Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, diukur dengan indikator Persentase Keluarga yang mengikuti Kegiatan di Poktan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi) (%). Tahun 2024 dengan target 25,13% terealisasi 25,13% atau dengan tingkat capaian 100%. Indikator ini diformulasikan dengan jumlah KK yang menjadi anggota kelompok tribina berbanding dengan jumlah KK. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- b. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- d. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

No	Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	40 Unit	40 Unit	100%
2	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250 Orang	250 Orang	100%
3	Tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	726 Orang	726 Orang	100%
4	Terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	378 Kelompok	378 Kelompok	100%

Menurut tabel di atas :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan Indikator Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit). Target Tahun 2024 sebanyak 40 unit dan terealisasi 40.
- 2) Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan Indikator Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang). Tahun 2024 target 250 orang dan terealisasi 250 orang.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan Indikator Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang). Target Tahun 2024 sebanyak 726 orang, dan terealisasi 726 orang atau tingkat capaian 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dengan indikator Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok), dengan target sebanyak 378

poktan dan terealisasi jumlah poktan yang terbentuk dan mendapat pembinaan sebanyak 405 poktan (BKB 150 poktan, BKR 80 poktan, BKL 131 poktan dan UPPKS 44 poktan), atau tingkat capaian 107%.

A. 2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024 dan % persentase Capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % persentase Capaian
1	Mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3.555.368.700	3.214.176.245 90,40%	2.081.209.750	1.678.730.407 80,66%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten				
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun	9.119.450.320	8.571.482.950 94%	8.862.173.850	7.637.165.646 86,18%
		Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)				

Dari tabel realisasi diatas, realisasi antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, terlihat Peningkatan nilai anggaran di dua Kinerja Utama yakni Mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA dan Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga.

Nilai Target Mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA Tahun 2024 sebesar Rp 3.555.368.700 dengan realisasi Rp 3.214.176.245 atau dengan capaian 90,40%, capaian kinerja lebih tinggi dari tahun 2023 yang memiliki target Rp 2.081.209.750 dan realisasi Rp 1.678.730.407 atau dengan tingkat capaian 80,66%.

Nilai Target Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga Tahun 2024 sebesar Rp 9.119.450.320 dengan realisasi Rp 8.571.482.950 atau dengan capaian 94%, capaian kinerja pun melebihi dari tahun 2023 dengan target Rp 8.862.173.850 dan realisasi Rp 7.637.165.646 atau tingkat capaian 86,18%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya meningkatnya kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan serta meningkatnya capaian keberhasilan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu.

A. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Tingkat Capaian			Tingkat Capaian 2024 Dibanding kan Akhir Renstra (2026) (%)	Target Capaian Akhir Tahun Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra
					2022	2023	2024	2026	2022	2023	2024				
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya Pelaksanaan PUG (kategori APE)	Scoring pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG)	69,75	68,37	68,84	69,97	66,87	67,75	67,75 (Data 2023)	97%	Rp6.783.941.825	Rp3.214.176.245	47,38%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya IPM perempuan	-Harapan lama sekolah perempuan - Rata-Rata lama sekolah perempuan - Pengeluaran per Kapita Perempuan (juta rupiah per thn)	84,74	84,9	85,12	85,77	85,09	85,74	85,74 (Data 2023)	100%			
		Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten			750	850	950	950	630,65	633,51	633,51 (Data 2023)	67%			
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun	Menurunnya Angka Kelahiran	Median usia perkawinan pertama	2,41	2,31	2,21	2,01	2,67	2,43	2,20	91%	Rp17.983.357.904	Rp8.571.482.950	47,66%
		Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Meningkatnya Kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan keluarga (ibangga)	57	59	61	65	57,69	61,72	63,57	98%			

Dari tabel diatas realisasi kinerja s.d. tahun 2024 dan dibandingkan dengan target Jangka menengah akhir tahun Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, dan 5 (lima) indikator tujuan, serta 6 (enam) indikator sasaran terealisasi belum mendekati target yang ditetapkan.

Pada IKU pertama yaitu Mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA sampai dengan tahun 2024 tingkat capaian dibandingkan target s.d. akhir tahun Renstra sebesar 47,38%. Akuntabilitas yang baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Untuk Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi Tahun 2024 sebesar 67,75 (data 2023) sedangkan target akhir renstra 69,97 (atau dengan tingkat capaian 97%). Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) realisasi Tahun 2024 sebesar 85,74 (data 2023) sedangkan target akhir renstra 85,77 (atau dengan tingkat capaian 100%) sudah mencapai target akhir renstra. Capaian Kinerja Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten realisasi Tahun 2024 sebesar 633,51 (data 2023) sedangkan target akhir renstra 950 (atau dengan tingkat capaian 67%).

Pada IKU kedua yaitu Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga sampai dengan Tahun 2024 tingkat capaian dibandingkan target s.d. akhir tahun Renstra sebesar 47,66%. Capaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang memudahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu untuk menyelesaikan sisa target yang harus di capai di akhir Renstra. Capaian Kinerja Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun realisasi Tahun 2024 sebesar 2,20 sedangkan target akhir renstra 2,01 (atau dengan tingkat capaian 91%). Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) realisasi Tahun 2024 sebesar 63,57 sedangkan target akhir renstra 65 (atau dengan tingkat capaian 98%).

Capaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang memudahkan Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu untuk menyelesaikan sisa target yang harus di capai di akhir Renstra.

A. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (BKKBN dan Kementerian PPA)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi	Target 2024	
			2024	BKKBN	Kementerian PPA
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,75 (Data 2023)		74,18
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,74 (Data 2023)		91,39
		Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	633,51 (Data 2023)		
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun	2,20	2,1	
		Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	63,57	61	

Dari tabel diatas, untuk realisasi IDG, IPG Kabupaten Tahun 2024 masih menunggu data dari BPS, sehingga untuk realisasi menggunakan data Tahun 2023. Yakni Data IDG 67,75 dan data IPG 85,74. Data IDG dan IPG masih belum mencapai target Nasional Kementerian PPA. Data Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Tahun 2024 masih menunggu dari Kementerian PPA, sehingga sementara data yang digunakan adalah data Tahun 2023 yakni 633,51. Realisasi Capaian Persentase Total Fertility (TFR) usia 15-49 Tahun 2024 di tanah bumbu 2,20, masih ditargetkan agar data semakin tahun semakin menurun (semakin menurun semakin bagus), semakin mendekati target BKKBN Provinsi. Realisasi Ibangga yakni 63,57 sumber data dari BKKBN Provinsi, sudah melebihi dari target Nasional BKKBN sebesar 61.

A. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

A. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dengan dua urusan (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan Kegiatan :
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan Kegiatan :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak, dengan Kegiatan :
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Program Pengendalian Penduduk, dengan Kegiatan :

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

ALTERNATIF/SOLUSI :

Selama tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan pada DP3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu umumnya sudah berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian IKK Bidang DP3AP2KB. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka terwujudnya pencapaian kinerja adalah mengevaluasi kembali usulan-usulan dana untuk menunjang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu agar hasil yang diharapkan berhasil guna dan tepat waktu.

Berdasarkan pelaksanaan program Bidang PUGPPPA, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga ada beberapa resiko yang sering ditemui/terjadi sehingga capaian program/kegiatan tidak maksimal, diantaranya :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas P3AP2KB
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB
3. Masih banyaknya Calon Pengantin yang Usia Anak

Rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Melatih pegawai yang ada di Dinas P3AP2KB agar semakin Kompeten sesuai kebutuhan Dinas P3AP2KB
2. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, dan mengadakan Pelayanan KB Bergerak
3. Semakin banyak memberikan edukasi kepada calon pengantin usia anak

A. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Ketersediaan Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung hasil kinerja terdiri dari efisiensi sumber daya biaya dalam hal ini dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya manusia. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Presentase
1	Mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA	Rp19.280.139.269	Rp17.800.686.058	92,33%
2	Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga			

Pada tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, pagu anggaran perubahan belanja Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp19.280.139.269,- dengan realisasi sebesar Rp17.800.686.058 Atau capaian sebesar 92,23%. Realisasi keuangan terhadap capaian Sasaran IKU DP3AP2KB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran IKU
DP3AP2KB
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 14 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2 . 14 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2 . 14 . 01 . 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.361.855.796	3.573.705.121	100%	3.573.705.121	100,00%	18,36%	18,36%	3.331.820.356	93,23%
2 . 14 . 01 . 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	800.103.840	1.010.071.688	100%	1.010.071.688	100,00%	4,37%	4,37%	881.602.786	87,28%
2 . 14 . 01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2 . 14 . 01 .2.06.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.397.000	17.397.000	100%	17.397.000	100,00%	0,10%	0,10%	17.397.000	100,00 %
2 . 14 . 01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.434.100	11.434.100	100%	11.434.100	100,00%	0,06%	0,06%	11.434.100	100,00 %
2 . 14 . 01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.315.500	379.980.500	100%	379.980.500	100,00%	1,58%	1,58%	373.658.500	98,34%
2 . 14 . 01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.480.400	6.480.400	100%	6.480.400	100,00%	0,04%	0,04%	6.428.800	99,20%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 14 . 01 . 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.905.600	15.906.200	100%	15.906.200	100,00%	0,09%	0,09%	15.906.200	100,00 %
2 . 14 . 01 . 2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.474.800	1.474.800	100%	1.474.800	0,00%	0,00%	0,01%	0	0,00%
2 . 14 . 01 . 2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.603.000	647.967.000	100%	647.967.000	100,00%	2,32%	2,32%	639.489.574	98,69%
2 . 14 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2 . 14 . 01 . 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.930.000	236.430.000	100%	236.429.999	100,00%	1,29%	1,29%	134.325.707	56,81%
2 . 14 . 01 . 2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.834.440	209.834.440	100%	209.834.440	100,00%	1,15%	1,15%	206.991.040	98,64%
2 . 14 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2 . 14 . 01 . 2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.144.000	241.394.000	100%	241.394.000	94,74%	1,02%	1,08%	196.972.800	81,60%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 14 . 01 . 2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.030.000	100.530.000	100%	100.530.000	50,01%	0,21%	0,43%	46.285.000	46,04%
2 . 14 . 01 . 2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.715.000	152.715.000	100%	152.715.000	100,00%	0,83%	0,83%	152.715.000	100,00 %
2 . 08 . 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
2 . 08 . 02 . 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 02 . 2.01 .03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	36.861.900	73.810.300	100%	73.810.300	79,88%	0,16%	0,20%	55.926.300	75,77%
2 . 08 . 02 . 2.01 .04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.296.600	11.296.600	100%	11.296.600	88,49%	0,05%	0,06%	9.996.600	88,49%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 08 . 02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik ,Hukum,Sosial,dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 02 . 2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.400.304.500	1.415.124.500	100%	1.415.124.500	99,58%	7,62%	7,65%	1.350.317.782	95,42%
2 . 08 . 02 . 2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	17.804.600	17.804.600	100%	17.804.600	90,59%	0,09%	0,10%	15.054.600	84,55%
2 . 08 . 02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 08 . 02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.667.300	20.376.800	100%	20.376.800	97,79%	0,22%	0,22%	16.689.300	81,90%
2 . 08 . 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2 . 08 . 03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 03.2.01.01	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	61.555.100	61.555.100	100%	61.555.100	100,00%	0,34%	0,34%	60.331.200	98,01%
2 . 08 . 03 . 2.03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/KotaKabupaten/Kota									

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 08 . 03 . 2.03 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.168.660	56.168.660	100%	56.168.660	63,68%	0,20%	0,31%	32.405.400	57,69%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 03 . 2.03 .02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penangan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.669.000	76.669.000	100%	76.669.000	100,00%	0,39%	0,39%	72.151.972	94,11%
2 . 08 . 03 . 2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.798.600	4.798.600	100%	4.798.600	100,00%	0,03%	0,03%	4.648.000	96,86%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 08 . 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
2 . 08 . 04 . 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 04 . 2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	64.007.900	64.007.900	100%	64.007.900	38,05%	0,13%	0,35%	24.357.900	38,05%
2 . 08 . 04 . 2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.900.800	14.900.800	100%	14.900.800	100,00%	0,08%	0,08%	14.900.800	100,00 %
2 . 08 . 04 .2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 08 . 04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.215.500	24.215.500	100%	24.215.500	86,37%	0,11%	0,13%	20.083.500	82,94%
2 . 08 . 04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.915.300	50.915.300	100%	50.915.300	99,41%	0,25%	0,25%	50.615.300	99,41%
2 . 08 . 04 . 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 04 . 2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	19.548.000	12.438.000	100%	12.438.000	93,97%	0,10%	0,11%	11.652.000	93,68%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 08 . 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
2 . 08 . 05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	80.888.300	80.888.300	100%	80.888.300	100,00%	0,44%	0,44%	67.258.300	83,15%
2 . 08 . 05.2.01.02	Penyajiaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.391.200	9.391.200	100%	9.391.200	100,00%	0,05%	0,05%	9.391.200	100,00 %
2 . 08 . 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
2 . 08 . 06 . 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah , dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 08 . 06 . 2.01 .02	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	62.423.100	40.823.100	100%	40.823.100	99,27%	0,34%	0,34%	36.685.950	89,87%
2 . 08 . 06 . 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
2 . 08 . 06 . 2.02 .01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	324.372.200	302.618.200	100%	302.618.200	99,47%	1,76%	1,77%	298.267.000	98,56%
2 . 08 . 06 . 2.02 .03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.176.300	65.256.300	100%	65.256.300	100,00%	0,20%	0,20%	64.861.300	99,39%
2 . 08 . 06 . 2.02 .04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.923.200	1.923.200	100%	1.923.200	100,00%	0,01%	0,01%	1.923.200	100,00 %

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2. 08. 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2. 08. 07. 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2. 08. 07. 2.01. 01	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	43.732.000	-		-		0,00%	0,24%	0	0,00%
2. 08. 07. 2.01. 01	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	16.978.600	56.550.300	100%	56.550.300	89,66%	0,08%	0,09%	48.530.300	85,82%
2. 08. 07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2. 08. 07. 2.02. 02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	208.620.940	199.620.940	100%	199.620.940	46,06%	0,52%	1,14%	89.062.754	44,62%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2. 08. 07. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2. 08. 07. 2.03. 01	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	806.295.000	819.295.000	100%	819.295.000,00	97,35%	4,29%	4,40%	786.939.788	96,05%
2. 08. 07. 2.03. 03	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kotaMemerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.780.500	16.780.500	100%	16.780.500	100,00%	0,09%	0,09%	16.215.200	96,63%
2. 08. 07. 2.03. 03	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	58.140.000	58.140.000	100%	58.140.000	100,00%	0,32%	0,32%	55.910.599	96,17%
2 . 14 . 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2. 14. 02. 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	24.891.200	24.891.200	100%	24.891.200	93,37%	0,13%	0,14%	20.976.000	84,27%
2. 14. 02. 2.01. 02	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	40.740.000	40.740.000	100%	40.740.000	92,34%	0,21%	0,22%	37.620.000	92,34%
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	14.279.600	4.799.600	100%	4.799.600	71,87%	0,06%	0,08%	3.393.800	70,71%
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	6.807.000	6.807.000	100%	6.807.000	100,00%	0,04%	0,04%	6.731.694	98,89%
	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Forma	13.978.000	4.498.000	100%	4.498.000	54,98%	0,04%	0,08%	2.419.000	53,78%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	4.055.400	6.119.400	100%	6.119.400	100,00%	0,02%	0,02%	6.087.900	99,49%
2. 14. 02. 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
2. 14. 02. 2.02. 01	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	5.778.000	7.842.000	100%	7.842.000,00	100,00%	0,03%	0,03%	7.842.000	100,00 %
2. 14. 02. 2.02. 08	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	388.352.900	444.202.900	100%	444.202.900	98,94%	2,10%	2,12%	369.122.200	83,10%
2. 14. 02. 2.02. 11	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	59.600.000	59.600.000	100%	59.600.000	100,00%	0,33%	0,33%	59.600.000	100,00 %
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	449.675.400	409.375.100	100%	409.375.100	100,00%	2,46%	2,46%	337.811.157	82,52%
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	74.401.500	68.551.500	100%	68.551.500	99,34%	0,40%	0,41%	33.570.000	48,97%
2. 14. 02. 2.02. 13	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	131.379.000	74.759.000	100%	74.759.000	94,65%	0,68%	0,72%	69.679.700	93,21%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2 . 14 . 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
2 . 14 . 03 . 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya LokalKearifan Budaya Lokal									
2 . 14 . 03 . 2.01 .01	Pengendalian Program KKBPK	194.813.200	194.693.200	100%	194.693.200	84,85%	0,90%	1,06%	159.458.000	81,90%
2 . 14 . 03 . 2.01 . 04	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	672.350.000	836.386.200	100%	836.386.200	97,20%	3,57%	3,67%	815.713.550	97,53%
2. 14 . 03 . 2.01 . 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	201.624.000	155.529.600	100%	155.529.600	100,00%	1,10%	1,10%	152.289.600	97,92%
2 . 14 . 03 . 2.01 .07	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	539.778.900	599.778.900	100%	599.778.900	100,00%	2,95%	2,95%	588.543.400	98,13%
2. 14 . 03 . 2.01 . 08	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	3.093.550	3.093.550	100%	3.093.550	100,00%	0,02%	0,02%	3.093.550	100,00 %

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2. 14 . 03 . 2.01 . 08	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	259.502.900	261.302.900	100%	261.302.900	94,37%	1,34%	1,42%	238.624.450	91,32%
2 . 14 . 03 . 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)									
2 . 14 . 03 . 2.02 .01	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	17.500.000	17.500.000	100%	17.500.000	100,00%	0,10%	0,10%	17.395.000	99,40%
2. 14 . 03 . 2.02 .04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.004.000.000	1.033.615.000	100%	1.033.615.000	100,00%	5,48%	5,48%	1.033.615.000	100,00 %
2. 14 . 03 . 2.02 .04	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	28.012.800	28.012.800	100%	28.012.800	100,00%	0,15%	0,15%	28.012.800	100,00 %
2 . 14 . 03 . 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
2 . 14 . 03 . 2.03 .01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	97.840.600	30.801.200	100%	30.801.200	100,00%	0,53%	0,53%	30.746.200	99,82%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2. 14 . 03 . 2.03 .03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	253.923.600	254.471.970	100%	254.471.970	97,56%	1,35%	1,39%	248.270.340	97,56%
2 . 14 . 03. 2.03 .06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	948.150.500	1.008.505.100	100%	1.008.505.100	98,88%	5,12%	5,18%	991.363.400	98,30%
2. 14 . 03. 2.03 . 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya	59.814.600	55.225.600	100%	55.225.600	97,01%	0,32%	0,33%	53.225.500	96,38%
2 . 14 . 03 . 2.03 .11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	34.639.000	141.778.000	100%	141.778.000	100,00%	0,19%	0,19%	137.943.600	97,30%
2. 14. 03. 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	386.235.800	387.135.800	100%	387.135.800	100,00%	2,11%	2,11%	386.921.200	99,94%
2. 14. 03. 2.04. 03	Pembinaan Terpadu Kampung KB	29.625.600	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	0,16%	0,16%	3.000.000	100,00 %

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
2. 14. 03. 2.04. 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	564.711.000	564.711.000	100%	564.711.000	100,00%	3,08%	3,08%	558.003.000	98,81%
2 . 14 . 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
2 . 14 . 04 . 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2 . 14 . 04 . 2.01 .01	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	170.000.000	120.900.000	100%	120.900.000	100,00%	0,93%	0,93%	120.900.000	100,00 %
2 . 14 . 04 . 2.01 .05	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	98.763.000	94.218.000	100%	94.218.000	78,93%	0,43%	0,54%	74.241.000	78,80%

Kode Program Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target TW IV		Realisasi				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Bobot	Keuangan	
				(%)	(Rp)				Rp	%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.131.797.000	2.138.505.800	100%	2.138.505.800	91,41%	10,64%	11,64%	1.937.369.909	90,59%
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga remaja (BKR),Pusat Informasi dan Konselin Remaja (PIK -R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	60.000.000	38.100.000	100%	38.100.000	100,00%	0,33%	0,33%	37.900.000	99,48%
		18.309.772.626	19.280.139.269	100%	19.280.139.268		96,58%	100%	17.800.686.058	92,33%

B. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik di intern Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu maupun dengan pihak luar.

A. 7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai 10 (sepuluh) program yang mendukung pencapaian target kinerja, 22 Kegiatan di Bidang, 5 Kegiatan di Bagian Sekretariat, total Kegiatan 27, serta Total Sub Kegiatan di Bidang 59, Total Sub Kegiatan di Bagian Sekretariat 14, sehingga total keseluruhan sub kegiatan 73.

Capaian Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu dengan IKU Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA serta Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga. Berikut target, realisasi dan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 :

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3AP2KB
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	518	518	100%	3.361.855.796	3.573.705.121	3.331.820.356	93,23%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100%	800.103.840	1.010.071.688	881.602.786	87,28%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	60	100%	17.397.000	17.397.000	17.397.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450	450	100%	11.434.100	11.434.100	11.434.100	100,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17	17	100%	289.315.500	379.980.500	373.658.500	98,34%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100%	6.480.400	6.480.400	6.428.800	99,20%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100%	15.905.600	15.906.200	15.906.200	100,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24	0	0%	1.474.800	1.474.800	0	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	260	100%	424.603.000	647.967.000	639.489.574	98,69%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)	
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV		
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	236.930.000	236.430.000	134.325.707	56,81%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	209.834.440	209.834.440	206.991.040	98,64%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70	70	100%	197.144.000	241.394.000	196.972.800	81,60%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120	120	100%	78.030.000	100.530.000	46.285.000	46,04%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100%	152.715.000	152.715.000	152.715.000	100,00%	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50	50	100%	36.861.900	73.810.300	55.926.300	75,77%	
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	50	50	100%	11.296.600	11.296.600	9.996.600	88,49%	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1	1	100%	1.400.304.500	1.415.124.500	1.350.317.782	95,42%	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30	30	100%	17.804.600	17.804.600	15.054.600	84,55%	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	100%	40.667.300	20.376.800	16.689.300	81,90%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	61.555.100	61.555.100	60.331.200	98,01%
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	100%	56.168.660	56.168.660	32.405.400	57,69%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	100%	71.669.000	76.669.000	72.151.972	94,11%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW.IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%	4.798.600	4.798.600	4.648.000	96,86%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%	64.007.900	64.007.900	24.357.900	38,05%
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%	14.900.800	14.900.800	14.900.800	100,00%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	24.215.500	24.215.500	20.083.500	82,94%
	yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	38	76%	45.915.300	50.915.300	50.615.300	99,41%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	4	100%	19.548.000	12.438.000	11.652.000	93,68%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	100%	80.888.300	80.888.300	67.258.300	83,15%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%	9.391.200	9.391.200	9.391.200	100,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%	62.423.100	40.823.100	36.685.950	89,87%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	240	874	364%	324.372.200	302.618.200	298.267.000	98,56%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENT ASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	3	100%	37.176.300	65.256.300	64.861.300	99,39%
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	1.923.200	1.923.200	1.923.200	100,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	28	28	100%	43.732.000	0	0	0,00%
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	11	11	100%	16.978.600	56.550.300	48.530.300	85,82%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	5	5	100%	208.620.940	199.620.940	89.062.754	44,62%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	1	1	100%	806.295.000	819.295.000	786.939.788	96,05%
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	100%	16.780.500	16.780.500	16.215.200	96,63%
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	46	46	100%	58.140.000	58.140.000	55.910.599	96,17%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	100%	24.891.200	24.891.200	20.976.000	84,27%
		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	12	12	100%	40.740.000	40.740.000	37.620.000	92,34%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1	1	100%	14.279.600	4.799.600	3.393.800	70,71%
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	1	100%	6.807.000	6.807.000	6.731.694	98,89%
		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	1	100%	13.978.000	4.498.000	2.419.000	53,78%
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	12	12	100%	4.055.400	6.119.400	6.087.900	99,49%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	1	100%	5.778.000	7.842.000	7.842.000	100,00%
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1	1	100%	388.352.900	444.202.900	369.122.200	83,10%
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	1	100%	59.600.000	59.600.000	59.600.000	100,00%
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	149	149	100%	449.675.400	409.375.100	337.811.157	82,52%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSE NTASE	ANGGARAN			PERSENT ASE (%)
			TARGET	REALISA SI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	20	20	100%	74.401.500	68.551.500	33.570.000	48,97%
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	12	12	100%	131.379.000	74.759.000	69.679.700	93,21%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	12	12	100%	194.813.200	194.693.200	159.458.000	81,90%
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	12	12	100%	672.350.000	836.386.200	815.713.550	97,53%
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4	4	100%	201.624.000	155.529.600	152.289.600	97,92%
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	1	100%	539.778.900	599.778.900	588.543.400	98,13%
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	1	100%	3.093.550	3.093.550	3.093.550	100,00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32	32	100%	259.502.900	261.302.900	238.624.450	91,32%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	4	7	175%	17.500.000	17.500.000	17.395.000	99,40%
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	496	515	104%	1.004.000.000	1.033.615.000	1.033.615.000	100,00%
		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	543	508	94%	28.012.800	28.012.800	28.012.800	100,00%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5	5	100%	97.840.600	30.801.200	30.746.200	99,82%
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5999	5807	97%	253.923.600	254.471.970	248.270.340	97,56%
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	91	158	174%	948.150.500	1.008.505.100	991.363.400	98,30%
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	3	100%	59.814.600	55.225.600	53.225.500	96,38%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSentase (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	7	7	100%	34.639.000	141.778.000	137.943.600	97,30%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	12	100%	386.235.800	387.135.800	386.921.200	99,94%
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	20	20	100%	29.625.600	3.000.000	3.000.000	100,00%
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	20	20	100%	564.711.000	564.711.000	558.003.000	98,81%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	40	40	100%	170.000.000	120.900.000	120.900.000	100,00%
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250	250	100%	98.763.000	94.218.000	74.241.000	78,80%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		PERSENTASE	ANGGARAN			PERSENT ASE (%)
			TARGET	REALISASI s.d TW IV		TARGET		REALISASI s.d TW.IV	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	726	726	100%	2.131.797.000	2.138.505.800	1.937.369.909	90,59%
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	378	378	100%	60.000.000	38.100.000	37.900.000	99,48%
							19.280.139.269	17.800.686.058	92,33%

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat mempunyai pengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud, kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai, sumber pembiayaan kegiatan dimaksud dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2024 belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanah Bumbu terdiri atas belanja daerah dan belanja operasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Uraian pembiayaan belanja langsung dan belanja tidak langsung DP3AP2KB Kab.Tanah Bumbu TA. 2024.

Anggaran belanja operasi DP3AP2KB Kab.Tanah TA. 2024 adalah sebesar Rp 19.280.139.269,- yang terbagi menjadi belanja rutin operasional kantor sebesar Rp18.028.267.269,- dan belanja modal sebesar Rp 1.251.872.000,- (Bangunan Kantor UPTD & Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Balai KB di Kecamatan). Adapun Realisasi Belanja sebesar Rp 17.800.686.058,- atau 92,33%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

1. Untuk mewujudkan 2 (dua) Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu : Mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA dan Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga sangat ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak di Dinas P3AP2KB beserta stakeholder terkait untuk mencapai sasaran IKU tersebut.
2. Sesuai dengan Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk dalam sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu :
 - 1) Mewujudkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA :
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - c. Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten
 - 2) Mewujudkan Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga :
 - a. Angka Kelahiran Total (TFR)
 - b. Indeks Pembangunan keluarga (ibangga)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 masih menunggu data dari BPS, sehingga menggunakan data sementara realisasi Tahun 2023 yakni 67,75 atau tingkat capaian 98,42% (dari target 68,84) dengan kategori “Sangat Berhasil”. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 masih menunggu data dari BPS, sehingga menggunakan data sementara realisasi Tahun 2023 yakni 85,74 (dari target 85,12) atau tingkat capaian 100,73% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Scoring Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Realisasi Tahun 2024 masih menunggu data dari Kementerian PPA, sehingga menggunakan data sementara realisasi Tahun 2023 yakni 633,51 (dengan target 950) atau tingkat capaian 66,69% dengan katagori “Cukup Berhasil”.

Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100,45% (realisasi 2.20 dari target 2.21) dengan kategori “Sangat Berhasil”. Sedangkan Indikator Meningkatnya Kesejahteraan keluarga dengan Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) realisasi Tahun 2024 sebesar 63,57 dari target 61 (persentase capaian sebesar 104,21%) dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Secara garis besar pencapaian target sudah terpenuhi dan beberapa kegiatan perlu dilakukan lebih optimal. Untuk itu upaya-upaya yang akan dilakukan, antara lain :

1. Upaya dalam Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Hak perempuan dan pemenuhan hak anak melalui KLA.
2. Upaya dalam Peningkatan Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan Menurunkan Angka Kelahiran, dan meningkatnya kualitas keluarga dengan Ibangga.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program dan Kegiatan berikutnya yaitu:

1. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk Pencapaian Indikator Kinerja Program Kegiatan.
2. Meningkatkan Sinergitas antar lembaga dan antar instansi dalam pelaksanaan dan pencapaian target indikator kinerja.

3. Mengoptimalkan kegiatan promosi serta penyebaran informasi melalui website DP3AP2KB tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan di kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, 2 Januari 2025

Kepala Dinas P3AP2KB

Erli Yuli Susanti, S. H., M.H

Pembina /IV.a

NIP. 19840714 201001 2 038

LAMPIRAN

